

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU**

**Oleh:**

**AYU LANA LESTARI**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang berdampak serius, baik secara fisik maupun psikologis, bagi korban. Kejahatan ini semakin memprihatinkan ketika pelakunya adalah seorang guru. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait efektivitas penegakan hukum pidana, penerapan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh guru dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sat Reskrim PPA Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data dalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data dan prosedur pengolahan data. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru telah memiliki dasar hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut secara normatif telah mengatur tindak pidana dan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul terhadap anak, termasuk dilakukan oleh tenaga pendidik (guru). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru terdapat dua faktor yang paling dominan yaitu faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Pada faktor aparat penegak hukum yaitu kurangnya profesionalisme dan respon yang lambat dalam menangani perkara dan melindungi identitas korban. Sementara itu pada faktor masyarakat, kendalanya

*Ayu Lana Lestari*

adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah, terlihat dari orang tua yang ragu untuk melapor. Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum dan memperburuk kondisi psikologis korban.

Saran dari penelitian ini adalah meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh guru diperlukan sinkronisasi yang kuat antara tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dalam meningkatkan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan kepada anak yang dilakukan oleh guru diperlukannya profesionalisme dari seluruh pihak terkait.

**Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Pencabulan, Guru, Anak.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF CHILD MOLESTATION COMMITTED BY TEACHER**

**By:**

**AYU LANA LESTARI**

*Child molestation is a form of sexual crime that causes damage to society and has serious physical and psychological consequences for the victim. This crime is even more concerning when the perpetrator is a teacher. This situation raises legal issues related to the effectiveness of criminal law enforcement, the enforcement of laws and regulations, and legal protection for victims. This study aims to analyze law enforcement against child molestation committed by teachers and examine the factors influencing law enforcement against child molestation.*

*This research was conducted using a normative and empirical juridical approach. The data used in this study were primary and secondary data. The sources in this study were the Criminal Investigation Unit of the Women and Children Protection Unit of the Bandar Lampung Police and lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data in this study used data collection and data processing procedures. The data were analyzed using qualitative analysis methods.*

*The results of the research and discussion indicate that the law enforcement process is carried out through several stages, namely the formulation stage, the application stage, and the execution stage. Criminal law enforcement against child molestation committed by teachers has a clear legal basis in the Criminal Code (KUHP), Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence. These provisions normatively regulate criminal acts and criminal sanctions for indecent acts against children, including those committed by educators (teachers). There are two most dominant factors influencing law enforcement against child molestation committed by teachers: law enforcement officials and community factors. Among law enforcement officials, the lack of professionalism and slow response in handling cases and protecting the victim's identity are key obstacles. Meanwhile, regarding community factors, the obstacle is low public awareness, as seen in parents' hesitation to report. This can impact the legal process and worsen the victim's psychological condition.*

***Ayu Lana Lestari***

*The research suggests that improving criminal law enforcement against perpetrators of child molestation committed by teachers requires strong synchronization between the formulation, application, and execution stages. Improving criminal law enforcement against child molestation committed by teachers requires professionalism from all relevant parties.*

***Keywords: Criminal Law Enforcement, Obscenity, Teachers, Children.***